

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Administrasi Publik sebuah pembahasan mengenai ilmu sosial yang mengkaji tentang tiga elemen keutamaan dalam aktivitas bernegara. Di dalamnya meliputi lembaga legislatif, yudikatif, serta eksekutif dan apapun yang berhubungan dengan publik melalui administrasi pembangunan, manajemen, dan kebijakan-kebijakan yang menjadi tujuan negara serta etika dalam ketentuan penyelenggaraan sebuah pemerintah. Semua hal yang berkaitan atas terselenggaranya aktivitas yang sifatnya publik dan sudah mencakup pada studi Administrasi Publik utamanya pada hal kajian mengenai pelayanan. Seperti yang dituturkan oleh Chandler dan Plano dalam (Keban, 2004) bahwa Administrasi Publik adalah sebagai aktivitas yang dijadikan sumber daya maupun personal publik yang terorganisir dan melakukan formulasi, implementasi, pengelolaan untuk membuat sebuah putusan Dalam kebijakan publik. Jadi Administrasi Publik diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan warga negara di mana hak mereka untuk mendapatkan pelayanan publik. (Solechan, 2018)

Pemerintah daerah maupun Pusat berusaha keras agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah sebagai wujud untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, dimana salah satunya adalah melewati penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat tiga pengelompokan ragam pelayanan yang diberikan berdasarkan instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara dan daerah yang didasarkan terhadap produk yang diperoleh. Pasolong menjelaskan bahwa ragam pelayanan publik diantaranya yaitu ragam pelayanan administratif, ragam pelayanan barang serta ragam pelayanan jasa. (Praja, N., Santoso, E. R., & Lestari, 2021)

Dihadapkan oleh persoalan pengangguran adanya ketidakcocokan terhadap klasifikasi, serta minimnya keterampilan terhadap calon sumber daya manusia yang mencoba untuk merambah pada dunia kerja serta tidak adanya maksimal komunikasi di antara pemerintah daerah atau kabupaten.

kepada pemerintah provinsi di mana Kepala Dinas sebagai inspirator dapat memberikan fungsi melalui sarana teknologi informasi dan juga Optimalisasi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP). (Hariyati, H., Susanto, S., & Widodo, 2019)

Upaya ini merupakan sebuah penyelesaian persoalan yang terdapat pada pelaksanaan pelayanan publik untuk memenuhi tenaga kerja yang selaras atas keperluan perusahaan. Maka dari itu perlu adanya program pemagangan. Magang merupakan bagian atas sistem Latihan Kerja yang dilakukan secara terpadu di antara pelatihan pada suatu lembaga kerja bersama pekerjaan yang secara langsung di bawah mentor dan wawasan karyawan yang sudah memiliki pengalaman pada proses produksi jasa maupun barang. Pada rangkaian tersebut untuk dapat menguasai skills atau keterampilan maupun kompetensi.

Melewati sebuah program magang, tenaga kerja maupun alumni lulusan pendidikan yang memperoleh tambahan keterampilan serta pengakuan skills yang memiliki standar. Yang menjadi keunikan pada pelayanan ini adalah Aktivitas ini merupakan satu-satunya yang ada pada provinsi di Indonesia dengan melakukan penggabungan sarana online, potensi magang kerja pada perusahaan serta keterlibatan FKJP pada sebuah. Pada program tersebut pelayanan konsultasi magang, memperlihatkan silabus ataupun kurikulum magang, kontrak janji magang dan peta kompetensi kerja yang dilandaskan oleh standar khusus maupun standar kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Perolehan berdasarkan 6 perusahaan dari masing-masing tenaga kerja magang yang ditambahkan 2 kali lipat serta peluang kerja yang lebih besar sebanyak 94,07% perusahaan menerima peserta magang sebagai karyawan. (Ismail, et al, 2024)

Melalui undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, bahwa telah dikatakan tenaga kerja merupakan tiap-tiap individu yang bisa melaksanakan pekerjaan agar memperoleh jasa maupun barang untuk pemenuhan keperluan sendiri ataupun untuk masyarakat. Kualitas sebuah tenaga kerja adalah modal keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan tenaga kerja yang berkualitas bisa menghadirkan efek yang positif pada pembangunan negara utamanya adalah

pembangunan di bidang ekonomi.

Tingkatan kualitas tenaga kerja yang tidak lepas berdasarkan kinerja pemerintah daerah yang merupakan Dinas Ketenagakerjaan. Diantaranya pemanfaatan pemerintah yang paling penting adalah penyelenggaraan Layanan Umum yang diwujudkan pada tugas pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat. (Fadilah et al, 2024)

Dalam rangka meningkatkan kualitas calon tenaga kerja, pemerintah mengadakan berbagai program yang mendukung seperti pra pelatihan pemegang yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan kota Bandung. Aktivitas pemagangan pada negara memiliki tujuan agar dapat memberikan tingkatan sumber daya manusia yang terampil maupun terdidik, yang nantinya dijadikan sebagai modal mereka bersaing dalam dunia kerja. Adapun calon peserta magang yang merupakan masyarakat Bandung untuk mengikuti aktivitas pendaftaran melewati aplikasi Disnaker kota Bandung yaitu NEW BIMMA (Bandung Integrated Manpower management Application).

Tabel 1.1
Pengguna Layanan New BIMA

No	Layanan	Jumlah User
1	Kartu Pencari Kerja Ak-1	1544
2	Uji Kompetensi	60
3	Peserta Pelatihan	4310
4	Peserta Pemagangan	400
5	Pelaporan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	4928
6	Kasus Perselisihan Ditangani	41
7	Jumlah Lowongan Kerja	103
8	Perizinan LPK	10
9	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	40
10	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	14

Sumber : Disnaker Kota Bandung (Diolah Peneliti, 2023)

Di Tahun 2022 Jumlah Masyarakat Yang Terbantu Dengan Layanan New Bimma No Layanan Jumlah penggunan 1 Kartu Pencari Kerja Ak-1 1544 2 Uji Kompetensi 60 3 Peserta Pelatihan 4310 4 Peserta Pemagangan

400 5 Pelaporan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 4928 6 Kasus Perselisihan
Ditangani 41 7 Jumlah Lowongan kerja 103 8 Perizinan LPK 10 9 Pengesahan
Peraturan Perusahaan (PP) 40 10 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
14

Berdasarkan pemagangan menurut peraturan menteri ketenagakerjaan RI No.6 tahun 2020 mengenai terselenggaranya pemagangan di dalam negeri menjelaskan pengertian pemagangan bahwa bagian atas sistem Latihan Kerja yang dilakukan secara terpadu di antara latihan lembaga serta langsung dapat bekerja di bawah mentor dan wawasan intruksi maupun pekerja yang memiliki kompetensi pada aktivitas produksi jasa maupun barang di sebuah perusahaan dengan rangkaian penyesuaian skills dan lain sebagainya.(Handayani & Hartati, 2019)

Adapun manfaat dari pemagangan antara lain: (1) selain pengusaha teknis skill, pemegang dapat membuat sebuah keterampilan non-teknis calon pemegang. (2) tumbuhnya kondisi kerja yang dimotivasi kan oleh adanya inovasi atas peserta magang maupun pekerja pada sebuah lembaga yang bersangkutan.

Secara umum tujuan program pemagangan tersebut untuk mengurangi pengangguran yang tidak sedikit jumlahnya di kota Bandung dan mempersiapkan para pencari kerja yang ada di kota Bandung untuk bisa mengikuti seleksi pemagangan agar mendapatkan pekerjaan atau setidaknya meningkatkan sumber daya manusia.

Hal yang dibutuhkan agar terlaksananya program pemagangan di perusahaan antara lain:

- 1) Memahami ketentuan undang-undang mengenai pemagangan.
- 2) Keperluan perusahaan tenaga kerja untuk memberikan pemenuhan kualifikasi.
- 3) Melakukan susunan program pemagangan.
- 4) Kesempatan diantara pemegang bersama perusahaan yang sudah tertuang pada kontrak perjanjian.
- 5) Melakukan koordinasi bersama pihak pemerintah untuk melakukan pembagian ketenagakerjaan.
- 6) Memfungsikan sumber pengetahuan serta informasi yang terdapat pada

forum pemagangan lainnya.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang berlokasi di Jl. K.H. Wahif Hasyim No. 14, Merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang untuk menjalankan program pemagangan di kota Bandung. Melalui dinas tenaga kerja pemerintah kota Bandung menyelenggarakan aktivitas pemagangan dengan tujuan untuk memberikan tekanan angka pengangguran melewati program latihan kerja serta produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan informasi yang didapat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, pencapaian pelaksanaan program Pemagangan di dalam Negeri mengalami peningkatan 7% pada tahun 2022 . Hal ini terjadi akibat penyeleksian peserta Pemagangan di dalam Negeri yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung memiliki kesulitan yang cukup tinggi. Terbukti dari Yang mendaftar 73 orang hanya 20 orang lulusan D3 dan SMA/ sederajat.

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)								
Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
-	11.33	11.75	-	10.95	11.00	8.18	11.19	11.46

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung Dalam Angka

Dari Tabel 1.2 di atas bahwa Permasalahan pengangguran yang ada di kota Bandung, bahwa Kota Bandung memiliki demografi yang cukup tinggi yaitu sebesar 77% hingga dapat memperlihatkan bahwa total usia produktivitas seseorang tidak berbanding atas lowongan pekerjaan yang tersedia.

Data ini kemudian menjadi gambaran awal dalam penelitian ini, dimana secara kuantitas jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja yang telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan 7 produktivitas kerja cukup banyak sehingga sangat berpotensi menekan angka pengangguran terbuka di Kota Bandung karena sumber daya manusia dan tingkat

pengangguran terbuka saling berhubungan.

Aprianto Dharfan dan Khairrunisa Ulfah dalam penelitiannya berpendapat bahwa Apapun yang menjadi keutamaan pada penghadapan persaingan global pada zaman ini adalah menciptakan SDM yang memiliki kualitas, terampil dan mempunyai daya saing yang besar. Kaitannya saat ini dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia adalah adanya ketimpangan di mana kesempatan kerja terlalu sedikit bila dibandingkan dengan total angkatan kerja yang makin besar tiap tahunnya, apalagi tingkatan pendidikan angkatan kerja yang sudah dikategorikan relative rendah (Apriyanto, 2013).

Landasan dari penjelasan di atas, maka dari itu penulis sangat tertarik bisa melaksanakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Pemagangan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan pada latar belakang dan identifikasi masalah, dapat diperoleh rumusan masalah yang menarik untuk diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman program dan implementasi tepat sasaran dalam upaya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja?
2. Bagaimana Tepat Sasaran Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung?
3. Bagaimana efektivitas program yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas calon tenaga kerja secara tepat waktu?
4. Bagaimana Tercapainya Tujuan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung?
5. Bagaimana dampak dan perubahan nyata yang dirasakan oleh calon tenaga kerja setelah mengikuti program peningkatan kualitas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya

maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pemahaman program dan implementasi tepat sasaran dalam upaya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja
2. Tepat Sasaran Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung?
3. Sejauh mana efektivitas program yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas calon tenaga kerja secara tepat waktu
4. Tercapainya Tujuan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
5. Dampak dan perubahan nyata yang dirasakan oleh calon tenaga kerja setelah mengikuti program peningkatan kualitas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa analisis Ini bisa memberikan manfaat baik Secara teoretis maupun praktis agar beragam pihak yang memerlukan mendapatkan manfaatnya.

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi dinas Ketenagakerjaan mengenai program pemagangan di kota Bandung adalah ditambahnya pengetahuan yang berkaitan pada analisis di bidang program pemagangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Analisis ini diwujudkan dapat memberikan fungsi agar menghadirkan pengembangan wawasan dalam implementasi pengetahuan yang dipunyai oleh peneliti dalam hubungan efektivitas program pemagangan pada rangkaian untuk memberikan tingkatan kualitas calon tenaga kerja di dinas Ketenagakerjaan kota Bandung. Di samping itu analisis ini ingin memberikan tingkatan keselarasan mengenai teori terhadap praktik yang sedang terjadi di lapangan.

b. Bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

Analisis ini diwujudkan agar bisa memberikan bahan evaluasi pemerintah

untuk dapat memaksimalkan program pemagangan dengan rangkaian agar bisa meningkatkan kualitas calon dari peserta tenaga kerja..

b. Bagi Universitas

Perolehan analisis ini diwujudkan bisa memberi masukan agar memperbanyak Ilmu Administrasi Publik di sebuah institusi Pendidikan tepatnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Bagi masyarakat Jawa Barat

Perolehan analisis ini mewujudkan bisa memberi referensi gagasan positif serta pembangunan terhadap penyelesaian persoalan yang berhubungan atas judul dari analisis tersebut.

Analisis ini juga bisa memberikan ajakan kepada masyarakat kota Bandung untuk bisa memberikan kontribusi dan partisipasi terhadap pihak pemerintah untuk usaha-usaha mengatasi pengangguran di kota Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan efektivitas pelaksanaan program. Dan penulis akan melakukan penelitian yang membahas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Untuk Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bandung. dimana dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan penyerapan anggaran.

Pengukuran efektivitas program menurut (Sutrisno, 2010) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Program, melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
- 2) Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
- 3) Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan

program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

- 4) Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
- 5) Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

